

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Natria Lalandos* Billy J. Kepel** Jootje M. L. Umboh**

**Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Sam Ratulangi Manado*

RINGKASAN

Pelaksanaan Program eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Talaud masih memiliki banyak kendala yang dihadapi. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud sedang dalam tahap persiapan dari tahap pra-eliminasi ke tahap eliminasi pada tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara rinci dan mendalam (Sugiyono, 2009) mengenai pelaksanaan program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu Kepala Bidang P2P, Kepala Seksi P2PM, Pemegang Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemegang Program Malaria di Puskesmas (2 Orang), dan Masyarakat (3 Orang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Talaud masih mengalami beberapa kendala. Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana penderita kendala yang dihadapi adalah masih terdapat beberapa Puskesmas yang tidak memiliki alat mikroskopis dan juga tenaga yang terlatih. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko telah dilaksanakan dengan cukup baik, pembagian kelambu secara massal telah dilakukan dengan cakupan $\geq 80\%$ dan manajemen lingkungan terhadap pemberantasan sarang nyamuk telah dilakukan. Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah telah dilakukan dengan cukup baik melalui SKD-KLB yang dilaporkan setiap minggu. Peningkatan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, yang menjadi kendala adalah tidak adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai malaria. peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilakukan, namun belum dilakukan pelatihan kembali terhadap tenaga mikroskopis maupun kepada tenaga manajemen.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Seperti tidak adanya alat mikroskopis dan tenaga yang belum terlatih

Kata kunci : Malaria, Program Eliminasi Malaria

SUMMARY

The implementation of the malaria elimination program in Kepulauan Talaud Regency still has many obstacles. At present the District Health Office of the Talaud Islands District is in the preparation stage from the pre-elimination stage to the elimination stage in 2021.

This research is a qualitative research. Qualitative research in this research is to describe in detail and in depth the implementation of malaria elimination program in the Talaud Islands District Health Office. The informants in this study were 8 people, namely the Head of P2P Division, P2PM Section Head, Malaria Program Holder, Talaud Islands District Health Office, Malaria Program Holders in the Puskesmas (2 people), and Community (3 people).

The results of this study indicate that the implementation of the malaria elimination program in the Talaud Islands Regency still faces several obstacles. In the implementation of the discovery and management of patients, the problem faced is that there are still a number of Puskesmas that do not have micro-devices and trained personnel. The implementation of prevention and control of risk factors has been carried out quite well, mass distribution of bed nets has been carried out with coverage of $\geq 80\%$ and environmental management of eradication of mosquito nests has been carried out. The epidemiological surveillance and prevention of outbreaks has been carried out quite well through SKD-KLB reported every week. Improved communication, education and information (IEC) is carried out through counseling to the community, which is an obstacle in the absence of regional compliance specifically regulating malaria. the increase of human resources in the Talaud Islands Regency has been carried out, but no retraining of microscopic power has been carried out nor for management personnel.

The results of this study can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in the Talaud Islands Regency has been carried out quite well, but there are still some obstacles encountered in its implementation. Such as the absence of microscopic devices and untrained personnel

Keywords: Malaria, Malaria Elimination Program

Pendahuluan

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* betina dan menjadi masalah kesehatan dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) Setidaknya 270 juta orang di dunia menderita malaria dan lebih dari 2 miliar atau 42% dari populasi bumi memiliki risiko malaria. Angka kematian malaria di dunia pada tahun 2013 masih mencapai 47% dan 78% diantaranya adalah anak-anak di bawah 5 tahun (Anonim, 2015). Di Indonesia

dilaporkan sebagai penyumbang terbesar untuk kasus malaria adalah Provinsi Papua 2014 (29,57 per 1000 penduduk), 2015 (31,93 per 1000 penduduk) dan 2016 (45,85 per 1.000 penduduk) (Anonim, 2017).

Sebaran kasus malaria di Sulawesi Utara tahun 2016 adalah 1.752 dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 900 kasus. Berdasarkan umur kasus malaria di Sulawesi utara tahun 2017 banyak ditemukan pada usia 15-64 tahun (55%), usia 10-14 tahun (17 %), usia 5-9 tahun (12 %), usia 1-4 tahun

dan > 64 tahun masing-masing sebesar 8 %. Di Sulawesi Utara dari 15 Kabutaten Kota baru 5 Kabupaten Kota yang mencapai eliminasi malaria di tahun 2017 yaitu Tomohon, Manado, Sitaro, Bolaang Mongondow dengan target eliminasi di tahun 2020 yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Minahasa Utara. (Anonymous, 2017)

Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kasus malaria selama lima tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2013 tercatat 497 kasus malaria, tahun 2014 kasus malaria menurun menjadi 322 kasus, pada tahun 2015 angka kejadian malaria mengalami peningkatan hingga mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi 699 kasus dan pada tahun 2016 menurun menjadi 449 kasus malaria dan di tahun 2017 menurun menjadi 169. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaud sudah berada dalam tahapan praeliminasi dengan angka API < 1 per seribu penduduk dan memiliki target untuk masuk ke tahap eliminasi di tahun 2021.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten

Kepulauan Talaud. Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan prinsip kesesuaian (*appropriateness*). Kesesuaian adalah informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi informan adalah Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Talaud, Kepala seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular, Pemegang program malaria di Dinas Kesehatan, Dua (2) orang pemegang Pemegang Program Malaria di Puskesmas, Tiga (3) Masyarakat. Total informan dalam penelitian ini adalah 8 informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penemuan dan Tatalaksana Penderita

Penemuan dan tatalaksana penderita di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk kasus positif hampir semua dikonfirmasi secara mikroskopis. Ada beberapa Puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak memiliki mikroskop namun tetap dilengkapi dengan RDT. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan Nurdianah dkk (2015) di Kabupaten Kepulauan Bulukumba yang menyatakan bahwa pengobatan penderita malaria nanti dilakukan setelah adanya hasil konfirmasi dari laboratorium.

Pengobatan penyakit malaria di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menggunakan *Artemicin combination therapy* (ACT). Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian yang telah dilakukan pengobatan penyakit malaria di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan obat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu ACT. Hal ini dikarenakan obat untuk penyakit malaria tidak bisa diganti dengan obat lain.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko

Pembagian kelambu di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan. Pembagian kelambu ada yang dilakukan secara massal dan ada yang tidak. Pembagian kelambu secara massal dilakukan pada wilayah fokus dengan nilai API yang tinggi dan wilayah yang terjadi KLB. *Indoor Residual Spraying* (IRS) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan faktor resiko. Pelaksanaan IRS di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak dilakukan terus menerus karena Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang. Namun, pernah dilakukan IRS pada tahun 2016 saat terjadi KLB di

wilayah kerja Puskesmas Mangaran. Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dialami diantaranya adalah ketersediaan bahan yang kurang dan tenaga yang belum terlatih dalam melakukan IRS.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak memiliki metode lain selain manajemen lingkungan. Hal yang menarik adalah adanya Jumantik Cilik yang dilatih, dilakukan pelatihan terhadap siswa-siswi SD untuk menjadi Jumantik Cilik. Mereka diajarkan untuk dapat mengidentifikasi larva nyamuk di tempat penampungan air. Pemantauan efikasi insektisida yang dilamnya termasuk kelambu berinsektisida tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa petugas kesehatan merasa bahwa bukanlah tindakan yang etis untuk masuk dan memeriksa kamar dari masyarakat penerima kelambu berinsektisida.

3. Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program eliminasi malaria. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam surveilans epidemiologi dan penanggungan wabah adalah dengan melakukan SKD-KLB, dianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten

Kepulauan Talaud. Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan SKD-KLB, ini dilakukan melalui laporan mingguan dan juga laporan bulanan. Puskesmas membuat laporan SKD untuk semua jenis penyakit termasuk didalamnya malaria. Laporan SKD ada dalam bentuk mingguan dan ada juga laporan bulanan. Sistem informasi memberikan pengaruh dalam pencatatan dan pelaporan penderita malaria. di Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk sistem informasi kesehatan untuk malaria telah berbasis aplikasi yaitu menggunakan E-sismal yaitu sistem pencatatan dan pelaporan yang berbasis elektronik. Dalam pelaksanaannya penggunaan program ini terkendala dengan ketersediaan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Puskesmas tidak dapat mengirim laporan ke Dinas kesehatan karena tidak memiliki jaringan internet yang mendukung. Kurang efektifnya pengendalian vektor menambah sulit capaian preeliminasi malaria (Hutagalung dkk, 2016)

4. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pelaksanaan eliminasi malaria dapat mencapai tujuannya apabila ditunjang dengan kerjasama dengan sektor atau program lainnya. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Talaud didukung sektor lain yang berhubungan dengan program eliminasi malaria seperti sektor kesehatan masyarakat (Kesmas) yang membantu dalam proses promosi. Integrasipun dilakukan dalam melakukan eliminasi malaria diantaranya dalam penemuan penderita dilakukan integrase dengan semua poliklinik yang ada baik yang ada di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Pelaksanaan eliminasi malaria yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 tahun 2009 haruslah didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi/Kab. Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak memiliki Peraturan Daerah dalam melaksanakan eliminasi malaria. Hal ini berbeda dengan pemerintah di Provinsi Bali yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi Bali serta Peraturan Bupati Karangasem No. 2 tentang eliminasi malaria di Kab. Karangasem Provinsi Bali (Roosihermiatie dan Rukmini, 2012).

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud pun telah melakukan advokasi terhadap Pemerintah Daerah

(Pemda) namun tidak mendapatkan respon ataupun bantuan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana dalam pelaksanaan eliminasi sepenuhnya bergantung dari Lembaga donor yaitu *Global Fund* (GF). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman (2017) di Halmahera Timur dimana sumber pembiayaan untuk eliminasi malaria hanya berasal dari GF. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roosihermiatie dan Rukmini (2012) yang melakukan penelitian di Provinsi Bali dan Kab. Karangasem, hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar bahkan hampir semua dana untuk eliminasi malaria berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak mendapatkan bantuan lainnya termasuk dari pihak swasta.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Ketersediaan tenaga mikroskopis yang terlatih sangat diperlukan dalam penemuan dan dalam menegakkan diagnosis terhadap penderita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa Puskesmas yang tidak memiliki petugas mikroskopis dan ada juga yang tidak. Namun, ada juga Puskesmas yang memiliki petugas mikroskopis namun tidak memiliki sarana mikroskop. Hal ini seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Lestari (2012) yang menyatakan bahwa pemerataan distribusi tenaga pada

program eliminasi malaria memberikan dampak yang besar dalam pelaksanaan efektifitas pelaksanaan pengendalian malaria yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Pelatihan terhadap tenaga mikroskopis telah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelatihan dilakukan beberapa tahun lalu dan belum dilakukan refreasing terhadap petugas mikroskopis yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dana untuk melaksanakan refreasing terhadap petugas mikroskopis. Kendala lain dalam dihadapi adalah ada petugas mikroskopis yang telah di latih namun tidak lagi bekerja pada bidang malaria karena regulasi yang ada di Daerah. Pada saat dilakukan pelatihan ada petugas yang telah dilatih namun tidak memiliki sarana sehingga pelatihan yang diterima tidak dapat dipraktekan secara terus menerus, setelah alat mikroskop telah dilengkapi petugasnya yang justru dimutasikan ketempat lain. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasyimi dkk (2015) yang menyatakan bahwa tenaga yang menangani malaria masih belum terdistribusi secara merata karena beberapa faktor bahkan untuk tenaga analisis di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku masih sangat kurang.

Kesimpulan

1. Penemuan dan Tatalaksaa Penderita Pelaksanaan penemuan dan tatalaksana penderita di Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan dengan cukup baik karena telah dilakukan di semua Puskesmas di semua poliklinik yang ada baik rawat jalan maupun rawat inap. Kendala yang dihadapi diantara belum semua Puskesmas melakukan pemeriksaan scara mikroskopis karena tidak adanya alat mikroskopis dan tenaga mikroskopis yang terlatih. Kegiatan penting lain yang tidak terlaksana dengan baik dalam penemuan dan tata laksana penderiata adalah pemeriksaan kembali sediaan darah dan juga pemantauan terhadap efikasi obat malaria karena tidak ada dokumentasi kegiatan ataupun laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberantasan malaria terdiri dari tiga tahapan yaitu pembagian kelambu berinsektisida, *Indoor Residual Spraying (IRS)* dan larvasidasi yang belum dilaksanakan dengan baik baik.
3. Surveilans Epidemiologi dan Penanggulan Wabah Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah telah terlaksana dengan cukup baik.
4. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan peningkatan komunikasi informasi dan edukasi di Kabupaten Kepulauan Talaud belum terlaksana dengan baik.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud belum terlaksana dengan maksimal karena belum diadakan pelatihan kembali.

Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. Meningkatkan pengawasan secara menyeluruh dan secara terus menerus terhadap kinerja petugas kesehatan di semua unit pelayanan kesehatan.
 - b. Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap surveilans dan epidemiologi wabah.
 - d. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi dengan

- pemerintah daerah dan juga semua petugas ada di Puskesmas.
- e. Melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan program malaria baik tenaga mikroskopis maupun tenaga administrasi.
2. Bagi Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. Meningkatkan dan memperluas cakupan penemuan dan tatalaksana penderita agar dalam pengobatan penderita dapat selalu di konfirmasi secara laboratorium.
 - b. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko dengan peningkatan cakupan pembagian kelambu dan manajemen lingkungan masyarakat.
 - c. Meningkatkan sistem SKD baik secara mingguan maupun bulanan, meningkatkan pelaporan kasus dengan segera dan melakukan pemetaan fokus malaria dengan membuat GIS.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat, meningkatkan advokasi terhadap pemerintah desa.
 - e. Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium terhadap penderita.
3. Bagi Institusi Pendidikan

Menjadi penelitian perbandingan terhadap penelitian selanjutnya apabila ada yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam penilaian terhadap pelaksanaan program eliminasi malaria.

Daftar Pustaka

- Anonimous, 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Surveilans dan Sistem Informasi Malaria, Daerah Pemberantasan dan Daerah Eliminasi Malaria di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
- _____2017a. *Evaluasi dan update Kebijakan Program Malaria*. Direktur P2PTVZ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- _____2017b. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- _____2018a. *Prevalence and Epidemiology of Malaria in Nigeria: A Review*. Department Of Biological Sciences Yobe State University, Nigeria. *International Journal Of Research In Phamacy and Biosciences*. Vol. 4
- Hasyimi M, Waris L, Felly P, Senewel F.P dan Uniplaita Y.E.O. 2014. *Tahapan Eliminasi Malaria di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun*

2014, *Dalam Peneliti pada Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat*

- Hutagalung J., Kusnanto H., Supargiyono., Hamim S., Satyagraha A. 2016. *Kajian ilmiah Pre-eliminasi Malaria di Wilayah Timur Indonesia*. OSIR. 2016;9(1):1–7.
- Lestari, T. 2012. *Pengendalian Malaria dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(1), pp.22–30.
- Nurdiyana, S. dkk. 2015. Studi Kasus Penatalaksanaan Manajemen Penanggulangan Malaria di Kabupaten Bulukumba. *Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan*. Vol.1, No.3. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/higiene/issue/view/282> (Diakses 3 Desember 2018)
- Roosihermiatie, B. dan Rukmini 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali*. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/2988/2221> (Diakses 23 April 2018)
- Salman, A. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Timur. *Ejournal Health*. Vol.2, No.5. <https://ejournalhealth.com/index.php/CH/article/view/626> (Diakses 3 Desember 2018)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.